

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Sejarah Desa Rahtawu

Desa Rahtawu atau yang dijuluki sebagai desa pewayangan ialah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Desa Rahtawu berada di daerah ujung utara Kecamatan Gebog. Desa Rahtawu selain menyimpan keindahan bukit-bukit serta sungai yang indah, Rahtawu juga menyimpan sejarah yang unik tentang keberadaan desa tersebut. Kata Rahtawu berasal dari bahasa jawa yakni *rah* yang berarti darah dan *tawu* yang artinya tidak dapat dibendung. Maka dapat disimpulkan darah yang tidak dapat dibendung, sehingga tempat ini dianggap suci karena pernah diduduki para tokoh pewayangan.

Sejarah mencatat, nama Desa Rahtawu berawal dari sosok Eyang Sakri sebagai seorang pendatang yang ingin mencapai kasampurnan hidupnya dengan bertapa di Desa Rahtawu. Saat istri Eyang Sakri melahirkan bayi laki-laki yang bernama Abiyoso mengeluarkan berlebihan darah yang tidak dapat dihentikan, maka darah keluar diibaratkan sebagai aliran air. Semenjak itulah Eyang Sakri memberi nama Desa Rahtawu (Yaitu darah keluar yang banyak dan sampai ditawu).<sup>1</sup>

Sedangkan makna kata berlebih dalam hal ini ialah munculnya air yang melimpah di Desa Rahtawu sampai tidak dapat terbenjung, bahkan Rahtawu tidak pernah kekeringan meskipun di musim kemarau yang larut panjang. Sejarah mengatakan bahwa dahulu Rahtawu merupakan sebuah telaga dan kemungkinan besar berupa lautan. Hal tersebut dibuktikan ditemukannya fosil-fosil purbakala di sekitar Desa Rahtawu. Apabila dilihat dari letak geografis dulunya gunung Muria terbelah dengan pulau Jawa, peristiwa erupsi yang telah menyatukan kedua pulau.<sup>2</sup>

Sementara itu, Rahtawu berasal dari bahasa sansekerta yakni dari kata *rah* dan *tawu*, *rah* mempunyai makna darah dan

---

<sup>1</sup> Ranga Aang Sadewa Dkk, *No Title Napak Tilas Para Leluhur Wukir Rahtawu*, LPPM IAIN Kudus (Kuuds: LPPM IAIN Kudus, 2021).

<sup>2</sup> Ahmad Fitrianto, "TAHUN 2021 I," *Analisis Dampak Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Dalam Perspektif Sosiologi Islam Di Desa Rahtawu, Gebog, Kudus Skri* (2021).

*tawu* berarti bercecer, jadi rahtawu ialah darah yang tercecer atau mengalir. Sehingga, Rahtawu sendiri dikisahkan tidak pernah terjadi pertumpahan darah sebab Rahtawu sebagai tempat yang suci yang dijuluki " Bumi Suci Bumi Kasepuhan kadewan Rahtawu".

Sebagai desa yang suci, Desa Rahtawu juga memiliki mitos yang diyakini masyarakat setempat untuk di larangan menggelar pementasan wayang, baik itu wayang kulit maupun wayang golek. Kepercayaan sudah diyakini masyarakat secara turun temurun. Pernah suatu ketika terdapat pertunjukan wayang, saat itu dalang melakukan aksinya bermain pewayangan dalam waktu itu juga ada angin besar dan dibarengi hujan deras menghancurkan acara tersebut. Dari peristiwa tersebut, masyarakat Desa Rahtawu tidak lagi menggelar kesenian wayang. Masyarakat Desa Rahtawu meyakini bahwa para dewa yang dimainkan oleh dalang mara saat dimainkan perannya.<sup>3</sup> Sehingga ketika masyarakat Rahtawu ketika memiliki hajatan lebih memilih mengadakan kesenian tayub.

Peristiwa lain juga diceritakan bahwa ada seseorang yang datang ke Rahtawu membawa wayang. Seseorang tersebut ingin menancapkan wayangnya di puncak 29. Dalam perjalanannya, orang tersebut telah diingatkan warga ketika di warung. Dalam waktu itu juga warung tersebut tersambar oleh petir dan hancur. Bersyukur tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut.

## 2. Letak Geografis Desa Rahtawu

Desa Rahtawu merupakan desa yang terletak pada ujung atas Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Desa ini secara geografis berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut ini:<sup>4</sup>

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| Utara   | : Desa Tempur Kabupaten Jepara      |
| Timur   | : Desa Ternadi Kecamatan Dawe       |
| Selatan | : Desa Menawan                      |
| Barat   | : Kawasan Hutan Lindung Kab. Jepara |

Desa Rahtawu bertempat di ketinggian 700 m dipermukaan laut, sehingga mempunyai iklim tropis dengan suhu sedang. Dari Kecamatan Gebog Desa Rahtawu berjarak 10

---

<sup>3</sup> Hasil Dokumentasi dan wawancara penulis, pada Hari Kamis, 26 Januari 2023 tentang Asal Usul desa Rahtawu.

<sup>4</sup> Profil Wilayah – Desa Rahtawu – Kabupaten kudus dalam web media online <http://desa-rahtawu.kuduskab.go.id/index.php/profil/profil-wilayah.html#:~:text=Jarak%20Desa%20Rahtawu%20dengan%20ibukota,Rahtawu%20adalah%201.610%2C67%20ha.>

Km dan jarak dari pusat Kota Kudus yaitu 18 Km. Letak geografis yang berada dipegunungan dengan tebing yang menjulang, pada musim penghujan Desa Rahtawu amat rawan dengan bencana longsor.<sup>5</sup>

Desa Rahtawu memiliki luas wilayah sebesar 1.610, 67 Hektar. Luas ini terdiri dari 180,71 Hektar lahan sawah dan 1.429,96 Hektar lahan non sawah. Luas lahan non sawah yang dimiliki dimanfaatkan masyarakat untuk bangunan, kebun, empang dan sebagainya.<sup>6</sup>

### **3. Visi dan Misi Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus**

- a. Visi Desa Rahtawu  
 “Terwujudnya Desa Rahtawu yang Mandiri, Jujur, Adil, Sejahtera, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”.
- b. Misi Desa Rahtawu
  - 1) Menyatukan seluruh komponen masyarakat Desa Rahtawu untuk bersama-sama membangun Desa Rahtawu sebagai desa yang makmur, berbudaya, bermartabat berdaya saing dan berwibawa;
  - 2) Menggali dan mengoptimalkan potensi ekonomi Desa Rahtawu untuk dikelola secara proporsional dan profesional;
  - 3) Meningkatkan kualitas layanan Pemerintah, Pendidikan, Ketertiban, Kebersihan, Kesehatan dan olahraga;
  - 4) Melestarikan dan mengembangkan budaya yang ada di Desa Rahtawu guna menciptakan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan memiliki tingkat solidaritas sosial yang tinggi;
  - 5) Menumbuhkembangkan keunggulan komparatif atau kompetitif Desa Rahtawu dengan meningkatkan sinergitas dunia pendidikan, pelatihan, instruktur dan pariwisata.

### **4. Struktur Pemerintahan Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus<sup>7</sup>**

- a. Kepala Desa: Rasmadi Didik Ariyadi
- b. Sekretaris Desa: Sukono

---

<sup>5</sup> Dokumen profil Desa Rahtawu Gebog Kudus, tempat di Balai Desa Rahtawu, pada hari Kamis, 26 Januari 2023

<sup>6</sup> BPS Kabupaten Kudus, Kabupaten Kudus dalam Angka 2018, (Kudus:2018), 3

<sup>7</sup> Hasil Dokumentasi data mengenai jumlah penduduk Desa Rahtawu, wawancara penulis, pada hari kamis, 26 Januari 2023

- c. Kepala Seksi Pemerintahan: Suratno
- d. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Kastono Ardi
- e. Kepala Urusan Umum: Achmad Sahir
- f. Kepala Urusan Keuangan: Sulkani
- g. Kepala Urusan Perencanaan Swadaya dan Pelaporan: -
- h. Kepala Dusun I: Sugiarto
- i. Kepala Dusun II: Saneko
- j. Kepala Dusun III: Sarim
- k. Kepala Dusun IV: Abdul

**5. Gambaran Umum Monografi Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus**

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data tahun 2021, jumlah kepala keluarga di Desa Rahtawu berjumlah 1.327 Kepala Keluarga dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Rahtawu

| JENIS KELAMIN | JUMLAH     |
|---------------|------------|
| Laki-laki     | 2.504 jiwa |
| Perempuan     | 2.485 jiwa |
| Jumlah        | 4.989 jiwa |

Bersumber dari hasil observasi dan dokumentasi data desa

Populasi masyarakat di Desa Rahtawu sebanyak 4.989 jiwa terbagi di 4 RW dan 25 RT. Populasi masyarakat ini sangat didominasi oleh kaum laki-laki dengan jumlah 2.504 jiwa.

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama Islam menjadi agama prioritas di tengah masyarakat Rahtawu, yaitu sebanyak 97,1 %. Sedangkan agama Budha dan Kristen hanya 1,9% dan 0,8%. Adapun rincian jumlah penganut agama tersebut yaitu:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk menurut Agama yang dianut

| NO | AGAMA/KEPERCAYAAN | JUMLAH PENGANUT |
|----|-------------------|-----------------|
| 1  | Islam             | 4.848           |
| 2  | Budha             | 99              |
| 3  | Hindu             | -               |
| 4  | Kristen Katolik   | -               |

|               |                      |       |
|---------------|----------------------|-------|
| 5             | Kristen Protestan    | 42    |
| 6             | Konghucu             | -     |
| 7             | Penganut Kepercayaan | -     |
| <b>JUMLAH</b> |                      | 4.989 |

Bersumber dari hasil observasi dan dokumentasi data desa

c. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3 Data Penduduk menurut tingkat Pendidikan

| <b>NO</b>     | <b>JENJANG PENDIDIKAN TERAKHIR</b> | <b>JUMLAH</b> |
|---------------|------------------------------------|---------------|
| 1             | Tidak Sekolah/belum tamat SD/MI    | 1.455         |
| 2             | SD/MI                              | 1.596         |
| 3             | SLTP                               | 543           |
| 4             | SLTA/SMU                           | 323           |
| 5             | D1, D2, D3, S1, S2                 | 72            |
| <b>JUMLAH</b> |                                    | 4.989         |

Bersumber dari hasil observasi dan dokumentasi data desa.

Taraf pendidikan di Desa Rahtawu dapat dikatakan dalam tingkatan rendah, sebab mayoritas masyarakat Desa Rahtawu hanya tamatan SD.

d. Mata Pencaharian

Mayoritas masyarakat Desa Rahtawu memiliki mata pencaharian dari bertani, baik petani kopi, jagung, padi dan sebagainya. Adapun secara rinci mata pencaharian tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Mata Pencaharian di Desa Rahtawu

| <b>NO</b> | <b>JENIS PEKERJAAN</b> | <b>JUMLAH</b> |
|-----------|------------------------|---------------|
| 1         | Petani                 | 2.637 Orang   |
| 2         | Buruh Tani             | 362 Orang     |

|    |                            |                    |
|----|----------------------------|--------------------|
| 3  | Wiraswasta                 | 6 Orang            |
| 4  | Buruh Harian Lepas         | 129 Orang          |
| 5  | Buruh Bangunan             | 362 Orang          |
| 6  | Pedagang                   | 102 Orang          |
| 7  | Transportasi/Supir         | 35 Orang           |
| 8  | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 14 Orang           |
| 9  | TNI/POLRI                  | 3 Orang            |
| 10 | Pensiunan                  | 5 Orang            |
| 11 | Lain-lain                  | 2.334 Orang        |
|    | <b>JUMLAH</b>              | <b>4.989 Orang</b> |

Bersumber dari hasil observasi dan dokumentasi data desa.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Pemetaan Aktor-aktor pengelola pariwisata

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang dianggap penting untuk daerah yang berada dalam kawasan yang mempunyai potensi wisata alam ataupun wisata kuliner. Dengan berbagai macam wisata yang telah dibangun agar bisa menarik perhatian dari kalangan wisatawan yang ada. Agar bisa mewujudkan pariwisata yang baik, tentunya membutuhkan aktor pengelola yang bisa diunggulkan dalam pengelolaan wisatanya. Dari pemaparan H. Rasmadi Didik Aryadi, S.H selaku salah satu informan yang diwawancarai oleh peneliti menjelaskan, yakni:

“Bahwasannya Desa Rahtawu yang terkenal sebagai desa wisata, serta banyak destinasi yang bisa menjadi pilihan menu liburan yang murah dan menyenangkan untuk keluarga. Desa ini berada di kawasan lereng Pegunungan Muria. Pariwisata yang ingin dikembangkan tentunya harus mempunyai aktor pengelola yang berpengalaman. Aktor-aktor yang berpengalaman tentunya juga dilatarbelakangi

oileh kemampuan ekonomi yang kuat. Semua aktor yang mampu menjadi motivator pengelolaan pariwisata Desa Rahtawu sangat berbeda-beda dalam pengalaman mengelolanya. Maka dari itu, semua aktor dijadikan sebagai orang yang harus mampu bermusyawarah agar terciptanya pengelolaan pariwisata yang baik dan benar”.<sup>8</sup>

Banyaknya wisata yang tersedia untuk menu liburan yang susah disediakan oleh pengelola pariwisata serta ongkos yang murah untuk bisa dinikmati oleh para wisatawan. Dengan mudahnya tiket masuk kawasan wisata yang sudah diatur dalam kebijakan pengelolaan pariwisata yaitu pungutan 3000 rupiah untuk para pengunjung masuk kawasan wisata. Namun, tiket masuk kawasan wisata ini belum termasuk memasuki tempat-tempat wisata yang ada di Desa Rahtawu. Untuk masuk ke tempat wisata, pengunjung diberatkan untuk membayar sebesar yang ditentukan oleh tempat-tempat wisatanya.

Banyaknya pengunjung yang datang dan menikmati wisata di daerah tersebut, pastinya diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Dari pemaparan bapak Sutrisno selaku salah satu informan yang diwawancarai oleh peneliti menjelaskan yakni :

“pengelolaan pariwisata di Desa Rahtawu dengan memanfaatkan keindahan alam. Agar upaya pengelolaan yang dilakukan dapat berhasil dan mencapai tujuan yang diinginkan maka yang mengelola harus mempertimbangkan semua aspek mulai dari perencanaan, prinsip-prinsip, dan teknik apa saja yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan pariwisata”.<sup>9</sup>

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan mulai dari menngajak masyarakat untuk sadar terhadap adanya potensi wisata alam yang ada. Dalam mempengaruhi masyarakat yang belum tahu apa itu pariwisata ini juga harus diperhatikan oleh para aktor pengelola agar dalam pengelolaanya tidak hanya memandang salah satu pihak saja namun juga mengikutsertakan masyarakat lokal Rahtawu. Dalam pengelolaan sebuah pariwisata tentu juga membutuhkan aktor yang tepat serta konsep yang jelas

---

<sup>8</sup> Bapak Rasmadi Didik Aryadi, selaku kepala desa, wawancara dengan penulis pada tanggal 25 Januari 2023, pada pukul 09.10 WIB, di rumah kepala desa, wawancara 1, Transkrip.

<sup>9</sup> Bapak Sutrisno, selaku pokdarwis, wawancara dengan penulis pada tanggal 28 Januari 2023, pada pukul 10.10 WIB, di rumah kepala desa, wawancara 2, Transkrip

agar pariwisata yang dikelola dapat memberikan dampak positif baik bagi daerahnya maupun bagi masyarakatnya.

Semua kelompok kepentingan yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di Desa Rahtawu. Pemangku kepentingan tersebut meliputi 3 (tiga) pihak yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Wisata berbasis sumber daya di Rahtawu mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauannya. Menurut Bapak Rasmadi Didik Aryadi selaku kepala desa dan salah satu dari informan menjelaskan:

“Dalam pengelolaan pariwisata, Pemerintah Desa Rahtawu menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata (PMBP), atau biasa disebut *community based tourism* (CBT). Sesuai konsepnya, pemberdayaan masyarakat yang mengusung budaya asli masyarakat setempat dalam kegiatan sehari-hari. PMBP bukan hanya perusahaan pariwisata multi-stakeholder, tetapi juga memprioritaskan dampak pariwisata, sumber daya masyarakat, dan lingkungan. PMBP muncul dari kesadaran kritis masyarakat dalam menyusun strategi pembangunan dengan menggunakan kepariwisataan sebagai alat penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi sumber daya alam dan manusia, dimana partisipasi masyarakat menjadi pemain kunci dalam kegiatan kepariwisataan”<sup>10</sup>.

Dalam pelaksanaan pengelolaannya, Pemerintah Desa Rahtawu juga melibatkan beberapa aktor yang mempunyai peran khusus yang sudah di bagi setelah adanya perencanaan pengelolaan pariwisata. Adapun Aktor-aktor dalam pengelolaan Desa Wisata Rahtawu antara lain :

**Tabel 4.5**  
**Aktor-aktor Pengelola Desa Wisata Rahtawu**

| No | Aktor       | Peran Aktor  |
|----|-------------|--|
| 1  | Kepala desa | Kepala desa sangat berpengaruh dalam pengelolaan pariwisata di Desa Rahtawu. Karena dalam menjadikan Desa Wisata Rahtawu kepala desalah yang berkeinginan serta mempengaruhi masyarakat Desa Rahtawu untuk paham |

<sup>10</sup> Bapak Rasmadi Didik Aryadi, selaku kepala desa, wawancara dengan penulis pada tanggal 25 Januari 2023, pada pukul 09.23 WIB, di rumah kepala desa, wawancara 1, Transkrip.

|   |                |  |
|---|----------------|--|
|   |                | tentang pariwisata.  |
| 2 | Pokdarwis      | Dalam hal ini ketua pokdarwis juga tidak kalah penting dengan kepala desa karena Kelompok Sadar Wisata ini justru lebih dulu dalam mengelola pariwisata di Desa Rahtawu. Karena, sebelum adanya keputusan bahwa Desa Rahtawu telah menjadi desa wisata, pengelolaan pariwisata masih dikelola oleh Pokdarwis. Ketua Pokdarwis melakukan berbagai cara agar masyarakat tahu bahwa potensi pariwisata di sini memang sangat unggul sekali. |
| 3 | BUMDes         | berfungsi sebagai induk usaha bidang pariwisata tingkat desa. BUMDes akan menerima aset pariwisata yang telah dibangun oleh Pemerintah Desa Rahtawu untuk dikelola. Selanjutnya BUMDes akan membuat panduan teknis pengelolaan obyek wisata yang akan diserahkan kepada unit pengelola.  |
| 4 | Unit Pengelola | Unit pengelola direkrut oleh BUMDes bersama Pemerintah Desa Rahtawu. Unit pengelola berasal dari masyarakat yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan sesuai obyek wisata.   |
| 5 | Karang Taruna  | Karang Taruna berfungsi sebagai lembaga mitra Pemerintah Desa Rahtawu dan Bumdes dalam pengembangan pariwisata. Karang Taruna dapat dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan unit usaha pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.  |
| 6 | PKK            | PKK berfungsi sebagai lembaga mitra pendukung pengembangan obyek pariwisata. PKK dilibatkan dalam pemberdayaan perempuan dan pengembangan kapasitas dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata.  |
| 7 | Gapoktan       | Gapoktan berfungsi sebagai mitra Bumdes dalam pemberdayaan petani untuk  |

|   |        |   |
|---|--------|---|
|   |        | menghasilkan produk-produk yang dapat dijual di lokasi wisata.  |
| 8 | LMDH   | LMDH, berfungsi sebagai lembaga mitra Bumdes dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendukung upaya konservasi lahan dan pengembangan obyek wisata berbasis hutan. |
| 9 | Linmas | Linmas, berfungsi sebagai mitra Bumdes dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban dan penanggulangan bencana.  |

Bersumber dari hasil observasi dan dokumentasi data desa

Kontestasi para Aktor dalam mengelola wisata di Desa Rahtawu yang dulunya sangat minim masyarakat yang sadar bahwa di Rahtawu ini sangat berpotensi dengan adanya wisata alam. Dengan adanya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang mempunyai tujuan untuk memberikan masukan kepada masyarakat disana agar sadar bahwa potensi wisata di sini sangat indah sekali karena, tidak hanya wisata alam saja namun wisata religi juga menjadi tujuan bagi wisatawan. Dalam pengeloannya pokdarwis merupakan suatu kelompok yang mampu mengajak masyarakat yang dulunya tidak paham tentang apa itu pariwisata sekarang menjadi paham bahwa pariwisata mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kelompok sadar wisata inilah yang menjadi perintis pertama dalam munculnya pengelolaan pariwisata yang ada di Desa Rahtawu sebelum Desa Rahtawu ini menjadi desa Wisata. Dulu, pokdarwis hanya mempunyai beberapa orang yang mampu untuk segi ekonominya saja. Namun, setelah berjalan beberapa tahun dalam pengelolaan wisatanya aktor-aktor tersebut mampu mengajak beberapa orang yang dulu belum tau apa itu pariwisata. Dengan berbagai cara yang dilakukan salah satunya pokdarwis mensosialisasikan kepada masyarakat agar paham apa itu pariwisata. Dari pemaparan bapak Sutrisno selaku salah satu informan yang diwawancarai oleh peneliti menjelaskan yakni :

“sejak dulu pokdarwis hanya berisi orang-orang yang mampu dalam segi ekonomi saja, karena yang mampu dalam segi ekonomi dianggap mampu untuk menjadi tim pengelola wisata. Namun sejak adanya sosialisasi serta memberikan arahan tentang pariwisata terhadap masyarakat yang dulunya

tidak tahu tentang pariwisata sekarang banyak wisata-wisata yang mampu dikelola”.<sup>11</sup>

Setelah adanya pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh pokdarwis beserta elit-elitnya Desa Rahtawu menjadi sorotan bagi wisatawan untuk menikmati keindahan wisata alamnya. Namun, pengelolaan sekarang tidak hanya pokdarwis saja melainkan pemerintah desa serta masyarakat yang mempunyai lahan tempat wisata juga ikut dalam pengelolaan. Setelah adanya berbagai pemahaman tentang pariwisata, sekarang banyak muncul wisata yang mampu dikelola oleh masyarakat. Pemerintah desa yang dulunya hanya memantau saja dalam pengelolaan pariwisata, namun setelah Desa Rahtawu resmi menjadi desa wisata pemerintah desa mempunyai peran yang sangat penting bagi pengelolaan serta kemajuan pariwisata yang ada disana.

Pemerintah Desa Rahtawu menjadi peran yang sangat penting bagi kemajuan pariwisata disini setelah resmi disahkan menjadi desa wisata. Namun dengan hal ini tentu pemerintah desa tidak akan melepaskan elit-elit yang sudah dulu membangun pariwisata yaitu seperti elit-elit yang ada pada kelompok masyarakat pokdarwis. Pemerintah desa tentu tidak melupakan jasa-jasa elit tersebut karena, pemerintah desa membantu agar mendapatkan lirikan dari pemerintah kabupaten. Selain itu, pemerintah desa juga mempunyai peran untuk perumusan Desa Rahtawu menjadi desa Wisata. Dengan para aktor-aktor yang didukung dengan perekonomian yang baik dengan berbagai latar belakang aktor yang berbeda-beda agar mampu menghidupkan pariwisata disana. Dengan adanya pemerintah desa, pengelolaan pariwisatanya semakin maju karena di dukung oleh para elit-elit yang menduduki jabatan pada pemerintah desa.

Desa Rahtawu sekarang mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kudus agar terus berkembang dalam pengelolaan pariwisatanya. Setelah adanya perhatian dari para aktor-aktor sekarang masyarakat tidak lagi ragu untuk membangun tempat-tempat wisata yang baru lagi. Aktor-aktor pengelola yang menjadi perintis dulu, mereka yang memanfaatkan lahan tanaman dan menghasilkan benih-benih kopi yang berkualitas. Maka dari itu, Desa Rahtawu tidak hanya bisa dinikmati keindahan alamnya saja namun juga bisa dinikmati hasil buminya yang sangat bagus sekali.

---

<sup>11</sup> Bapak Sutrisno, selaku pokdarwis, wawancara dengan penulis pada tanggal 28 Januari 2023, pada pukul 10.15 WIB, di rumah kepala desa, wawancara 2, Transkip

Dari hasil-hasil bumi inilah para aktor dapat membangun pariwisata serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

## 2. Kebijakan pengelolaan pariwisata

Kebijakan merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh tim pengelola untuk wisatawan maupun pihak pengelola lainnya yang ikut andil dalam perumusan kebijakan pariwisatanya. Tentunya dalam hal ini, tim pengelola harus bisa mempertimbangkan atau mengajak semua yang terlibat dalam pengelolaan. Dengan pengelolaan pariwisata yang ada di Desa Rahtawu, juga sangat memperhatikan dalam pengambilan kebijakan pariwisata yang ada. Dari pemaparan H. Rasmadi Didik Aryadi, S.H selaku salah satu informan yang diwawancarai oleh peneliti menjelaskan, yakni :

“pengambilan kebijakan pengelolaan pariwisata yang diterapkan disini tetap melibatkan semua pihak terkait yang ikut dalam pengelolaan pariwisata yang sudah disepakati mulai dari pihak pemerinah desa, pengelola wisata, serta kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ikut andil dalam pengelolaan yang dilaksanakan di dusun-dusun artau bisa disebut MusDus (musyawarah dusun)”<sup>12</sup>

Kebijakan pengelolaan pariwisata yang ada di Desa Rahtawu, tetap melibatkan semua pihak terkait selaku pihak pengelola pariwisata yang ada. Namun dalam hal ini pemernah desa yang berperan menyelenggarakan musyawarah untuk pengambilan kebijakan pariwisatanya. Dalam perumusan kebijakan, pengelola pariwisata juga mempunyai tim pembuat kebijakan yang sangat memperhatikan banyak aspek. Seperti yang sudah dijelaskan di atas maka, Pemerintah Desa Rahtawu tidak memutuskan untuk mengambil kebijakannya sendiri. memihak dalam pengambilan kebijakan pariwisata yang sudah dijelaskan oleh informan dalam pengambilan kebijakan tetap melibatkan semua pihak pengelola pariwisatanya. Hal ini juga disampaikan oleh informan yang diwawancarai oleh penulis yang memaparkan yakni :

“pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pihak pengelola yang pariwisata di Desa Rahtawu ini dengan cara musyawarah yang laksanakan di dusun-dusun yang ada di

---

<sup>12</sup> Bapak Rasmadi Didik Aryadi, selaku kepala desa, wawancara dengan penulis pada tanggal 25 Januari 2023, pada pukul 09.30 WIB, di rumah kepala desa, wawancara 1, Transkip.

Desa Rahtawu serta melibatkan semua aspek tim pengelola atau pelaku penyelenggara wisata.”<sup>13</sup>

Kebijakan-kebijakan yang sudah di sepakati oleh tim pengelola pariwisata Desa Rahtawu serta didukung dengan adanya tim pembuat keputusan dalam pengambilan kebijakan tersebut. Yang mana kebijakan atau aturan-aturan bagi masyarakat lokal penduduk Desa Rahtawu serta untuk para wisatawan yang berkunjung menikmati keindahan wisata alam dan kuliner di Desa Rahtawu. Dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Desa Rahtawu juga sangat memperhatikan aspek-aspek penting agar terciptanya kebijakan-kebijakan ini tidak merugikan bagi penduduk lokal ataupun para wisatawan. Kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah desa bagi penduduk lokal maupun wisatawan, wajib bagi mereka harus menaati kebijakan yang sudah dilakukan

Kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa serta aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan berikut ini beberapa kebijakan yang sudah dilaksanakan :

- a. Pungutan tiket masuk kawasan Desa Wisata Rahtawu
- b. Pajak bagi pengunjung setelah menikmati kuliner Desa Rahtawu
- c. Bagi pengunjung, tidak diperbolehkan untuk membawa minuman keras
- d. Bermalam di homestay yang tersedia harus sudah ada ikatan suami istri
- e. Menjaga kebersihan lingkungan

Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, agar nantinya siapapun yang terlibat dengan adanya kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Rahtawu agar tidak merugikan oleh salah satu pihak bagi wisatawan ataupun penduduk lokal khususnya bagi pelaksana pengelolaan pariwisata di Desa Rahtawu. Sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh tim pengelola maupun pemerintah desa yang menjadi tanggungjawab bagi terjadi pariwisata ini.

---

<sup>13</sup> Bapak Sutrisno, selaku pokdarwis, wawancara dengan penulis pada tanggal 28 Januari 2023, pada pukul 10.20 WIB, di rumah kepala desa, wawancara 2, Transkip

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Politik Pariwisata

Politik Pariwisata merupakan penggabungan dari konsep Politik dan konsep Pariwisata. Dalam kajian akademis, politik selalu dikaitkan dengan istilah *Politics* atau *Policy*. Makna dari *Politics* menurut Plato dan Aristoteles menganggap sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*Polity*).<sup>14</sup> Karena politik sangat erat hubungannya dengan pariwisata karena pariwisata tidak dapat dilepaskan dari kegiatan politik suatu negara dimana industri pariwisata itu berada.

Pengembangan suatu bidang tidak bisa terlepas dari proses Politik begitupun dengan bidang Pariwisata. Pariwisata merupakan suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri untuk mencari kepuasan dari apa yang dialaminya setiap hari. Pengelolaan pariwisata yang ada di Desa Rahtawu tentunya tidak akan terlepas dari politik pariwisata. Dalam pengelolaan pariwisata yang ada, Pemerintah Desa Rahtawu dapat memegang penuh pengelolaan wisatanya setelah disahkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Nomor 556/ 385. 12/ 10.01/ 2020 tentang Penetapan Klasifikasi Desa Wisata Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, Desa Rahtawu memenuhi syarat untuuk ditetapkan sebagai desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Kudus.

Pengelolaan pada sektor pariwisata di Desa Rahtawu memang agak berbeda dengan pengelolaan di beberapa desa wisata lainnya. Yang mana, pada umumnya pengelolaan pariwisata di desa itu dikelola langsung oleh pemerintah desa. Namun, pada kenyataannya di Desa Rahtawu ini justru berbeda karena, pengelolaan pariwisata yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) yang sampai saat ini masih menjadi peran penting dalam pengelolaan wisatanya. Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) ini mengelola pariwisata di Desa Rahtawu sejak 2011 sampai 2020 setelah dinyatakan sebagai desa Wisata Rahtawu.<sup>15</sup>

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Desa Rahtawu telah disahkan

---

<sup>14</sup> Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. 14

<sup>15</sup> Sutrisno K.R, Ketua pokdarwis Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus wawancara dengan penulis, pada Senin 30 Januari 2023

dengan Nomor 556/ 385. 12/ 10.01/ 2020 pengelolaan pariwisatanya menjadi tanggungjawab penuh Pemerintah Desa Rahtawu. Namun, walaupun sudah menjadi hak dan tanggungjawab pemerin tah desa pengelolaan pariwisata yang ada tetap melibatkan semua aktor yang berperan penting dalam pengelolaannya. Dalam pengelolaan pariwisata yang ada, sudah jelas bahwa daam pengelolaan ini tidak akan terlepas dengan adanya peristiwa politik. Peristiwa politik yang ada dalam pengelolaan ini tidak begitu kelihatan bagaimana peristiwa politik yang ada. Namun, tampak terlihat jelas yang dibuktikan dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat sekali. Dalam pengelolaan pariwisata yang ada tidak hanya mengunggulkan pada potensi-potensi wisata saja, namun juga sangat memperhatikan pada aspek-aspek agama islam, yang secara tidak langsung dibuktikan dengan adanya tempat-tempat ibadah yang ada dilokasi wisata.

Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Perjalanan dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, statistik pariwisata merekam fenomena perjalanan manusia, seperti di lingkungan imigrasi, di mana seseorang melakukan perjalanan dengan pesawat ke negara lain atau perjalanan melalui laut, misalnya ke pelabuhan atau bahkan hotel dengan menggunakan jasa akomodasi. atau ke tujuan wisata tertentu. ketika seseorang membeli tiket. Kedua, fenomena perjalanan tidak tercermin dalam statistik pariwisata.<sup>16</sup> Mengingat bahwa mayoritas warga Desa Rahtawu wisatawan yang berkunjung beragama Islam, tentu pemerintah akan menyesuaikan kegiatannya serta fasilitas-fasilitasnya juga tidak melencang terhadap ajaran islam. Dengan banyaknya pilihan obyek yang dapat dikunjungi oleh wisatawan yang mayoritas muslim, maka dikawasan wisata terdapat tempat ibadah untuk kaum muslim serta kelengkapannya.

Pemerintah sebagai pemimpin pariwisata mengembangkan sumber daya pariwisata yang ada sehingga dapat dimanfaatkan dan mencegah kegiatan yang tidak diinginkan seperti kejahatan dan tindakan asusila. Selain itu, masing-masing dari lokasi wisata memiliki mushola yang berfungsi untuk para wisatawan muslim. Tuhan menciptakan segala sesuatu di bumi ini untuk

---

<sup>16</sup> Ajeng Puspita P. Politik Pariwisata (Studi Strategi Pemerintah Kota Tasikmalaya Dalam Pengembangan Sektor Wisata Alam Situ Gede. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi*.2018. 16

memanfaatkannya sebaik mungkin bagi manusia. Menurut pandangan ini, manusia sebagai khalifah Allah adalah makhluk yang paling sempurna dan juga paling mulia dari ciptaan Allah dan akal budi yang diberikan Allah. Oleh karena itu, tugas ini merupakan tugas yang berkelanjutan dan berkesinambungan, mulai dari pengelolaan, pemeliharaan, penggunaan, dan pelestarian sumber daya ciptaan Allah, dengan tujuan semata-mata untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh manusia di muka bumi.

Dalam islam pariwisata diperbolehkan atau tidak dapat dilihat dari niat dan tujuannya. Jika niat dan tujuannya baik maka itu tidak dilarang oleh syariat Islam. Tujuan untuk pengembangan produksi dan pemasukan negara, terkait dengan kebebasan pemutaran harta, keadilan dalam perputaran harta dan tujuan utamanya adalah kebahagiaan dunia akhirat. Tujuan diciptakannya manusia dimuka bumi ini adalah semata-mata untuk menciptakan kemakmuran di muka bumi. Allah menunjuk manusia sebagai pemimpin (khalifah) atas diri-Nya. Pada hakikatnya, tugas manusia dimuka bumi ada dua yaitu mengabdikan (ibadah) dan merawat kemakmuran bumi. Begitu pula dalam hal pariwisata, karena pariwisata tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat lokal saja, tetapi juga dibutuhkan oleh wisatawan asing. Maka dari itu, salah satu cara untuk memperkenalkan pariwisata kepada orang asing pada suatu daerah sangat baik jika sudah mampu mengelola dengan baik agar para wisatawan tertarik untuk berkunjung pada wisata-wisata yang ada.

## **2. Kekuasaan Elite**

Masyarakat merupakan titik awal pembentukan kelompok yang lebih tinggi. Anggota masyarakat yang memiliki kelebihan tersebut secara bergiliran bergabung dalam suatu kelompok yang disebut sebuah kelompok elit. Keunggulan bawaan mereka membuat mereka bergabung dengan kelompok elit yang berbeda dari kebanyakan anggota masyarakat yang tidak memiliki kelebihan. elit adalah seseorang yang mempunyai kelebihan dalam bidangnya yang mampu mempengaruhi orang-orang yang ada dibawahnya. Selain itu, elit juga bisa disebut orang yang memiliki keunggulan yang menduduki jabatan diatas, yang jumlahnya lebih sedikit dari massanya.

Elit dalam kelompok masyarakat merupakan individu dalam kelompok yang kelebihanannya diakui oleh kelompok lain

dalam masyarakat agar mampu mempengaruhi individu-individu lainnya dalam sebuah kelompok. Sedangkan kekuasaan, menurut Laswell dan Abraham Kaplan kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seorang aktor untuk mempengaruhi perilaku aktor lain sehingga perilaku aktor tersebut sesuai dengan keinginan aktor yang menjalankan kekuasaan tersebut. Robert A. Dahl melanjutkan Laswell dan Abraham Kaplan bahwa konsep kekuasaan mengacu pada kemampuan untuk mempengaruhi dari satu orang ke orang lain atau dari satu pihak ke pihak lain. Konsep elit dan kekuasaan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, di Desa Rahtawu juga terdapat hal yang sama dengan adanya elit dalam kekuasaan yang mana individu-individu dalam kelompok masyarakat mampu mempengaruhi individu-individu lainnya. Dengan mengacu pada elit yang berkuasa dalam suatu kelompok, elit yang mempunyai kelebihan dalam bidangnya mampu mengajak individu-individu yang belum paham mengenai konsep elit kekuasaan untuk mempengaruhinya.

Mengikuti penjelasan ahli tentang elit dan kekuasaan, kita harus memeriksa legitimasi dan partisipasi politik elit dan elit. Dalam elit penguasa, menurut Robert D. Putnam yang menilai elit dalam kaitannya dengan kekuasaan. Putnam menyatakan perlu memperhatikan ruang lingkup kekuasaan, yaitu fungsi apa yang dicakupnya dan seberapa luas cakupannya. Putnam mengatakan para pemimpin militer dapat mempengaruhi kebijakan pertahanan tetapi memiliki pengaruh yang sangat kecil dalam masalah pertanian. Sebaliknya, ada kelompok yang pengaruhnya kurang luas karena mereka sangat kecil. Grafik berikut ini memperjelas stratifikasi politik yang dikemukakan oleh Putnam

Pemerintah Desa Rahtawu yang dipimpin oleh Rasmadi Didik Aryadi, kini menjadi salah satu desa maju dan mandiri di Indonesia. Berkat dari sentuhan sang aksesos ini, Desa Rahtawu berhasil menjadi desa wisata. Pencapaian ini dimulai ketika Rasmadi Didik Aryadi menjabat kepala desa pada tahun 2020 hingga saat ini. Rasmadi Didik Aryadi tidak hanya menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan saja, tetapi ia juga sebagai aktor dilapangan dan penginspirasi warga Desa Rahtawu. Pembangunan Desa Wisata Rahtawu membutuhkan waktu yang cukup panjang hingga mencapai kesuksesan pada saat ini, elite Desa Rahtawu

banyak mengalami kegagalan-kegagalan dalam proses pembangunan maupun pengembangan wisata Desa Rahtawu.

Robert D. Putnam telah mengemukakan bahwa elit sangatlah erat hubungannya dengan kekuasaan. Seperti dalam pengelolaan pariwisata yang ada di Desa Rahtawu juga terdapat berbagai elit yang memegang kekuasaan. Seperti pemaparan dari Robert D. Putnam kelompok pembuat keputusan yang ada di Desa Rahtawu yaitu aktor-aktor yang memegang kekuasaan seperti kepala desa, kepala kelompok sadar wisata, serta organisasi masyarakat yang lain juga termasuk dalam kelompok pembuat keputusan. Dari banyaknya kelompok pembuat keputusan tersebut dilakukan setelah Desa Rahtawu disahkan menjadi desa wisata. Sebelum disahkan menjadi desa wisata, kelompok pembuat keputusannya merupakan elit-elit yang menduduki kekuasaan dalam pengelolaannya.

Setelah adanya kelompok pembuat keputusan selanjutnya ada juga kaum berpengaruh, kaum berpengaruh ini juga hampir sama dengan kelompok pembuat keputusan. Namun, kaum berpengaruh hanya saja mereka yang paling berpengaruh dalam pengembangan serta pengelolaan pariwisata yang ada di Desa Rahtawu. Selain itu, terdapat aktivis juga dalam pengelolaan pariwisatanya yang mana, aktivis ini juga dapat mempengaruhi seperti elit-elit yang berpengaruh dalam pengelolaannya. Namun ada sedikit pembeda antara kaum berpengaruh dengan aktivis tersebut. Yang membedakan antara keduanya yaitu, kaum berpengaruh cenderung dimiliki oleh orang-orang yang menduduki strata paling tinggi dalam pengelolaan. Begitu juga dengan aktivis merakalah yang menjadi pendorong untuk penunjang keberhasilan kaum berpengaruh untuk mempengaruhi masyarakat awam dalam pengelolaan pariwisata.

Pengelolaan pariwisata di Desa Rahtawu merupakan hal yang tidak mudah bagi elite-elite yang berperan dalam pengelolaannya. Dalam pengelolaan ini, ada ada beberapa elit yang sudah berupaya untuk bisa menjadikan Desa Rahtawu ini menjadi desa wisata. Dalam proses menjadikan Desa Wisata Rahtawu, elite-elite tersebut sudah melakukan berbagai cara agar Desa Rahtawu ini menjadi desa wisata. Terutama cara mempengaruhi warga Desa Rahtawu agar ikut serta dalam pengelolaannya sampai menjadi desa wisata yang bagus serta bisa bermanfaat bagi masyarakat lokal Rahtawu seperti yang dikatakan Bapak Rasmadi Didik Aryadi, “Desa Rahtawu ini

memiliki potensi pariwisata yang sangat strategis namun masyarakat Desa Rahtawu yang belum tahu apa itu pariwisata<sup>17</sup>

Selain cara untuk mempengaruhi warga Desa Rahtawu, ada berbagai cara dalam proses menjadikan Desa Wisata Rahtawu. Cara-cara yang dimaksud adalah seperti mensosialisasikan apa itu desa Wisata, pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata dan lain sebagainya.<sup>18</sup> Selain bapak Rasmadi Didik Aryadi yang menjadi elite dalam pengelolaan pariwisata di Desa Rahtawu, ada juga elite yang sangat berpengaruh penting dalam pengelolaannya yaitu bapak Sutrisno K.R selaku ketua Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) Desa Rahtawu. Yang mana dalam pembangunan atau pengelolaan pariwisata di Desa Rahtawu pokdarwis menjadi kelompok unggulan yang pertama kali membangun serta menumbuhkan masyarakat Rahtawu. Kelompok Sadar Wisata atau pokdarwis Desa Rahtawu merupakan kelompok masyarakat yang ingin menjadikan Desa Rahtawu ini menjadi desa wisata. pokdarwis ini mengelola serta mengajak masyarakat Desa Rahtawu agar bisa memanfaatkan lahan pariwisata yang sangat indah ini menjadi lahan perekonomian bagi mereka.

### 3. Kebijakan Publik

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Kebijakan publik merupakan penyumbang untuk mencapai keberhasilan suatu rencana, yang sangat melibatkan beberapa pihak terkait seperti masyarakat umum agar ikut mendapatkan dampaknya bagi keberhasilan suatu program. Walaupun kebijakan sebetulnya bisa dibuat oleh aktor yang memiliki kekuasaan dalam bidang tersebut, tetapi dengan adanya kebijakan publik orang yang memiliki kekuasaan tidak bisa

---

<sup>17</sup> Bapak Rasmadi Didik Aryadi, selaku kepala desa, wawancara dengan penulis pada tanggal 25 Januari 2023, pada pukul 09.10 WIB, di rumah kepala desa, wawancara 1, Transkrip.

<sup>18</sup> Bapak Rasmadi Didik Aryadi, selaku kepala desa, wawancara dengan penulis pada tanggal 25 Januari 2023, pada pukul 09.10 WIB, di rumah kepala desa, wawancara 1, Transkrip.

semena-mena mengambil kebijakannya sendiri. Kebijakan adalah rencana tindakan yang memandu dan memengaruhi perilaku mereka yang dipengaruhi oleh keputusan. Kebijakan dirancang dan dibuat secara sadar sehingga perilaku populasi (kelompok sasaran) yang dituju dimodelkan sesuai dengan nada dan kata-kata kebijakan.<sup>19</sup> Kebijakan pengelolaan pariwisata di Desa Rahtawu, juga sangat memperhatikan hal-hal yang telah dipaparkan di atas. Perumusan kebijakan tersebut, walaupun pemerintah desa sangat memiliki power untuk menjadikan kebijakan itu sendiri, namun pemerintah desa tidak semena-mena kebijakan tersebut dibuat. Pemerintah Desa Rahtawu justru melibatkan semua yang menjadi pelaku pengelolaan pariwisata di Desa Rahawu.

Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu kebijakan publik juga kebijakan yang dikembangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Implikasi pengertian dari pandangan ini bahwa kebijakan publik, yakni:

- a. Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang kebetulan.
- b. Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait.
- c. Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu.
- d. Bisa bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu dan bersifat negatif yang berarti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Kebijakan setidaknya-tidaknyanya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan/undang-undang yang bersifat memaksa.<sup>20</sup> Kebijakan merupakan pengambilan keputusan yang sudah disepakati oleh banyak orang atau kelompok. Dalam pengambilan kebijakan terdapat beberapa

---

<sup>19</sup> Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 20.

<sup>20</sup> James E. Anderson, *Public Policy Making* (New York NJ: Holt Reinhartnwinston, 2010).

aspek agar pengambilan keputusan tidak merugikan salah satu pihak yang terkait. Aspek-aspek yang perlu dilakukan dalam pengambilan kebijakan antara lain perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), Penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Sesuai dengan paparan teori yang ada diatas, Pemerintah Desa Rahtawu tentunya juga sudah menjalankan aspek-aspek dalam pengambilan kebijakan tersebut. Pada pengambilan kebijakan Pemerintah Desa Rahtawu tentu saja mengajak para elit ataupun aktor yang ikut serta dalam pengelolaan pariwisata. Dengan pertimbangan berbagai kelompok serta masyarakat yang ikut andil dalam pengambilan kebijakan, tentunya hal ini agar tidak menimbulkan kecemburuan social antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Pada aspek-aspek ini Pemerintah Desa Rahtawu juga sudah menjalankan pada aspek tersebut. Pada aspek ini, Pemerintah Desa Rahtawu juga sangat memperhatikan kebijakan-kebijakan publik pembuat keputusan. Dari pemaparan para ahli bahwasannya kebijakan publik merupakan sebuah tahapan yang harus dilakukan dalam pengembangan suatu wilayah atau dalam tahap pengelolaan. Maka dari itu, dalam pengelolaan pariwisata yang ada di Desa Rahtawu sangat memperhatikan hal tersebut. Kebijakan publik terdapat hubungan dengan kelompok pembuat keputusan. Akan tetapi, kebijakan publik akan sangat berpengaruh dalam tahapan yang akan dilakukan. Melalui kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rahtawu, banyak sekali tahapan yang dilakukan kurang lebihnya akan dijelaskan dibawah ini :

1. Tahap perencanaan

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternative-alternatif kepuasan.

Perencanaan menjadi tahap pertama dalam rangka pelaksanaan PMBP. Dalam pelaksanaan perencanaan ini, dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif sebagai wujud pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tahap perencanaan PMBP, Pemerintah Desa Rahtawu akan melakukan hal-hal ini. Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Penyusunan RPJMDesa yang merupakan rencana pembangunan selama 6 (enam) tahun kedepan. Terkait pembangunan sektor pariwisata akan dilakukan dengan melakukan kegiatan pemetaan dan perencanaan melalui metode *transect walk* ke lokasi-lokasi yang nantinya akan dikembangkan menjadi objek wisata. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan serangkaian rembung dengan masyarakat untuk mendapatkan ide, gagasan dan masukkan dalam pengembangan pariwisata.

## 2. Tahap pengorganisasian

Dr. Sp. Siagian MPA mendefinisikan bahwa pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pada tahap pengorganisasian Pemerintah Desa Rahtawu sudah melaksanakan tahap ini. Dalam pengorganisasian banyak sekali organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat yang ikut dalam perumusan kebijakan pengelolaan pariwisata di Desa Rahtawu. Kelompok-kelompok yang ikut serta dalam pengelolaan pariwisata di Rahtawu adalah sebagai berikut :

- a) Bumdes: berfungsi sebagai induk usaha bidang pariwisata tingkat desa. BUMDes akan menerima aset pariwisata yang telah dibangun oleh Pemerintah Desa untuk dikelola. Selanjutnya BUMDes akan membuat panduan teknis pengelolaan obyek wisata yang akan diserahkan kepada unit pengelola.
- b) Unit pengelola: Unit pengelola direkrut oleh BUMDes bersama Pemerintah Desa Rahtawu. Unit pengelola berasal dari masyarakat yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan sesuai obyek wisata.
- c) Pokdarwis: Dalam hal ini ketua pokdarwis juga tidak kalah penting dengan kepala desa karena Kelompok Sadar Wisata ini justru lebih dulu dalam mengelola pariwisata di Desa Rahtawu. Karena, sebelum adanya keputusan bahwa Desa Rahtawu telah menjadi desa wisata, pengelolaan pariwisata masih dikelola oleh Pokdarwis. Ketua Pokdarwis melakukan berbagai cara

- agar masyarakat tahu bahwa potensi pariwisata di sini memang sangat unggul sekali.
- d) Karang Taruna: Karang Taruna berfungsi sebagai lembaga mitra Pemerintah Desa Rahtawu dan Bumdes dalam pengembangan pariwisata. Karang Taruna dapat dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan unit usaha pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  - e) PKK: PKK berfungsi sebagai lembaga mitra pendukung pengembangan obyek pariwisata. PKK dilibatkan dalam pemberdayaan perempuan dan pengembangan kapasitas dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata.
  - f) Gapoktan: Gapoktan berfungsi sebagai mitra Bumdes dalam pemberdayaan petani untuk menghasilkan produk-produk yang dapat dijual di lokasi wisata.
  - g) LMDH: LMDH berfungsi sebagai lembaga mitra Bumdes dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendukung upaya konservasi lahan dan pengembangan obyek wisata berbasis hutan.
  - h) Linmas: Linmas berfungsi sebagai mitra Bumdes dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban dan penanggulangan bencana.

Pada tahapan pengelompokan atau pengorganisasian ini, yang mana dalam tahapan ini organisasi-organisasi masyarakat yang sudah ditentukan fungsinya sebagaimana yang dijelaskan di atas. Fungsi dan tujuan dibentuknya organisasi masyarakat ini, diharapkan dapat membantu pemerintah desa dan tim pengelola agar bisa menjadi mitra kerja dalam mensukseskan pengelolaan pariwisatanya. Dengan adanya job masing-masing kelompok masyarakat agar jelas bahwa tugas serta wewenang yang dimiliki kelompok tersebut berbeda-beda. Walaupun tugas dan wewenangnya berbeda-beda, tugas yang diberikan kepada masing-masing kelompok selalu berkesinambungan satu dengan yang lainnya.

### 3. Tahap penggerakan (pelaksanaan)

Tahap penggerakan atau pelaksanaan merupakan tahapan pengelolaan yang dilakukan setelah melewati beberapa tahap sebelumnya. Dalam tahap pelaksanaan, Desa Rahtawu sudah melewati tahap perencanaan dan tahap pengorganisasian. Dalam dua tahap sebelumnya dalam pengelolaan pariwisata kelompok-kelompok diatas

sudah dibagi tugas dan wewangnya masing-masing. Maka, dalam tahap pelaksanaan ini kelompok-kelompok yang sudah terbagi tugas dan wewangnya langsung melaksanakan hal tersebut. Hal ini sesuai dengan teori yang telah dipaparkan di atas bahwasannya, mobilisasi atau menggerakkan orang yang ikut dalam organisasi yang bertujuan berdasarkan pada tahap perencanaan dan pengorganisasian.

Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan pariwisata di Desa Rahtawu yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan lembaga masyarakat dan masyarakat, baik dari segi waktu pelaksanaan, biaya pelaksanaan, peran dan fungsi masing-masing pihak terkait akan dilaksanakan secara bersama-sama. Masyarakat akan dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan pengelolaan sehingga, masyarakat dapat ikut memiliki sarana dan prasarana yang telah dibangun. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata sedapat mungkin dengan menggunakan bahan baku lokal sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pengelolaan dilaksanakan dengan menghindari timbulnya kerusakan alam, tumbuhan maupun fauna yang mungkin terdampak dalam pembangunan tersebut.

#### 4. Pengawasan

Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan Henry Fayol. Pada tahap pengawasan, hal yang dilakukan tidak hanya mengawasi saja, tentunya ada aspek evaluasi ataupun meningkat hal-hal yang sudah disepati dalam tahap perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Dalam tahapan ini, semua organisasi serta pemerintah desa berhak melakukan pengawasan terhadap kesepakatan-kesepakatan yang ada, bahwa benar-benar sudah dilaksanakan atau belum.

Pengawasan dalam pengelolaan pariwisata tersebut, merupakan pengecekan suatu kegiatan yang sudah disepakati dalam tahap perencanaan diatas. Dalam tahap pengawasan, Pemerintah Desa Rahtawu memiliki peran utama dalam tahap ini selain masyarakat. Walaupun masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan pengelolaan pariwisata masyarakat juga perlu ikut dalam pengawasan

pelaksanaan kegiatannya agar apa yang sudah disekapati dalam perencanaan terlaksana dengan baik dan benar serta tidak adanya kecemburuan sosial terhadap pemerintah dan masyarakat.

